

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara

Effects of economic growth, Human Development Index, and minimum wages toward unemployment rate in North Sumatera Province

Nasrullah Hidayat¹, Eko Wahyu Nugrahadi¹, Haikal Rahman¹, Feronika Daoni¹

¹Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

* Korespondensi penulis: nasrullah@unimed.ac.id

ABSTRACT

Currently, the primary employment problem in Indonesia is the number of job opportunities that are generally not proportional to the growth of the working-age population. This situation can have an impact on the increasing unemployment rate. Various macro factors are argued to have critical effects on the fluctuations in unemployment rates in a region, including economic growth, human development, and minimum labour wages. This study aims to look at the effects of economic growth, the Human Development Index (HDI), and the minimum labour wages on the unemployment rate in North Sumatra from 2004 to 2021. By using a descriptive quantitative approach, this study uses time-series data published by Statistics Indonesia. This study applies analytical technique of double linear regression by using the Eviews 9 software. The results of this study show that economic growth negatively and significantly influences the unemployment rates in the North Sumatra Province. Increasing economic growth encourages higher labour absorption so that the unemployment rate decreases. The human development index and minimum labour wages also negatively and significantly affect unemployment rates in this province. An increase in the human development index reflects an increase in the level of education and skills of the workforce. Additionally, increasing the minimum wage encourages the workforce to be more flexible when entering the labour market.

Keywords: unemployment, economic growth, human development

ABSTRAK

Saat ini, masalah ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah jumlah kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Berbagai faktor makro ditengarai dapat menjelaskan fluktuasi tingkat pengangguran di suatu wilayah, termasuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan upah kerja minimum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah kerja minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2004-2021. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, kajian ini menggunakan data *time-series* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kajian ini menerapkan teknik analisis regresi linear berganda dengan memanfaatkan perangkat lunak Eviews. 9. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi pula sehingga tingkat pengangguran semakin menurun. IPM dan upah kerja minimum juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di provinsi ini. Kenaikan IPM menggambarkan peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, sedangkan kenaikan upah kerja minimum mendorong angkatan kerja lebih fleksibel saat masuk dalam pasar kerja.

Kata kunci: pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dilakukan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di suatu negara dengan memperhitungkan pendapatan total, pendapatan per kapita, pertambahan penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, serta pemerataan penduduk di wilayah tersebut. Untuk mencapai hal itu, upaya reformasi kebijakan diperlukan, terutama terkait dengan reformasi kebijakan fiskal untuk rasionalisasi struktur pajak, pengurangan subsidi, dan minimalisasi defisit fiskal (Sinha, 2023). Reformasi sektor keuangan juga perlu dilakukan dalam hal liberalisasi suku bunga, pelonggaran kontrol atas masalah modal, serta pembukaan sektor perbankan, asuransi ke dalam negeri, dan badan swasta asing. Selain itu, reformasi sektor infrastruktur perlu dilakukan melalui investasi swasta dalam infrastruktur dan telekomunikasi serta reformasi sektor pertanian yang ditujukan untuk perdagangan komoditas pertanian di dalam dan luar negeri (Hapsari, 2011).

Upaya pencapaian berbagai hal di atas mengindikasikan adanya kebutuhan akan kesempatan kerja dan pendapatan yang merata di tiap wilayah. Sayangnya, jumlah kesempatan kerja tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan angkatan kerja. Situasi ini dapat berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Kondisi ini dapat berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan penurunan daya beli masyarakat karena mereka tidak memiliki pendapatan (Aisyaturridho dkk., 2021). Tidak hanya itu, kondisi ini juga dapat berdampak pada kehidupan sosial, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kasus kejahatan dan kekerasan sehingga memengaruhi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi biasanya mengarah pada peningkatan aktivitas bisnis dan ekspansi. Ketika bisnis berkembang, peluang pekerjaan baru tercipta untuk memenuhi peningkatan permintaan barang dan jasa. Situasi ini dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Tidak hanya itu, selama periode pembangunan ekonomi, peningkatan investasi dan inovasi juga terjadi. Hal ini dapat menyebabkan pengembangan industri dan

teknologi baru, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peluang kerja baru.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif juga cenderung meningkatkan pola konsumsi penduduk. Saat mereka merasa yakin dan optimis terhadap iklim ekonomi yang berkembang, mereka cenderung menunjukkan perilaku peningkatan permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini dapat merangsang produktivitas tenaga kerja dan penyerapan penduduk angkatan kerja. Meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa struktur pasar tenaga kerja, yang mencakup berbagai aspek seperti kesesuaian keterampilan, fleksibilitas pasar kerja, dan tingkat upah, berperan penting untuk menentukan seberapa efektif pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam penciptaan pekerjaan. Efektivitas kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan regulasi pasar tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan, dapat memengaruhi dampak pertumbuhan ekonomi pada penciptaan lapangan kerja dan turunnya tingkat pengangguran. Oleh karena itu, perumus kebijakan perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik dalam upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah (Taime & Djaelani, 2021). Lebih lanjut, Sukirno (2009) mengemukakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah, dinamika ketenagakerjaan, kestabilan politik, serta kekayaan alam menjadi faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Kondisi peningkatan ini sering diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kontribusi kegiatan produktif penduduk terhadap peningkatan output. Memahami tingkat pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pendapatan negara dan pembangunan masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Suhendra dan Wicaksono (2020) mengemukakan adanya

hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Setiap penurunan 2% PDB diprediksi meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 1%. Situasi ini mengindikasikan adanya hubungan penting antara output kegiatan produksi dan pasar tenaga kerja.

Dalam jangka panjang, kebijakan terkait penanggulangan tingkat pengangguran diperlukan, terutama pada konteks Indonesia, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang secara simultan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Hal ini menggambarkan pentingnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Bertambahnya kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sekaligus dapat menjadi indikasi kemakmuran masyarakat serta pendapatan nasional (Sukirno, 2009). Pengangguran telah menjadi masalah ekonomi yang signifikan di banyak negara. Tingginya angka pengangguran dapat berakibat pada penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta semakin jamaknya kondisi kemiskinan dan munculnya masalah sosial (Latifah, 2017). Pengangguran merupakan individu yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, ataupun seseorang yang tidak bekerja akan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan juga dikategorikan sebagai pengangguran (Qomariyah, 2013). Pengangguran dapat menjadi suatu luaran kondisi perekonomian yang tidak berkembang akibat permintaan barang dan jasa menurun sehingga berdampak pada penurunan produksi dan berkurangnya penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja (Suhendra & Wicaksono, 2020). Dapat diartikan bahwa besarnya peningkatan barang dan jasa dapat mendorong peningkatan produksi yang dapat mengurangi tingkat pengangguran (Qomariyah, 2013).

Selain peningkatan konsumsi barang dan jasa, kenaikan tingkat upah juga berpengaruh pada turunnya angka pengangguran (Effendy, 2019). Kenaikan upah dapat terjadi ketika upaya penyesuaian upah gagal dilakukan sehingga jumlah penawaran tenaga kerja cenderung

seimbang dengan jumlah permintannya (Mankiw, 2018). Sementara itu, perusahaan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja saat tingkat upah minimum yang ditetapkan lebih rendah (Sanitra, 2021). Dengan kata lain, turunnya tingkat pengangguran akibat kenaikan kesempatan kerja hanya dapat terjadi apabila tingkat upah rendah atau turun (Prawira, 2018). Meskipun begitu, upah minimum rendah menandakan standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah (Mahihody dkk., 2018).

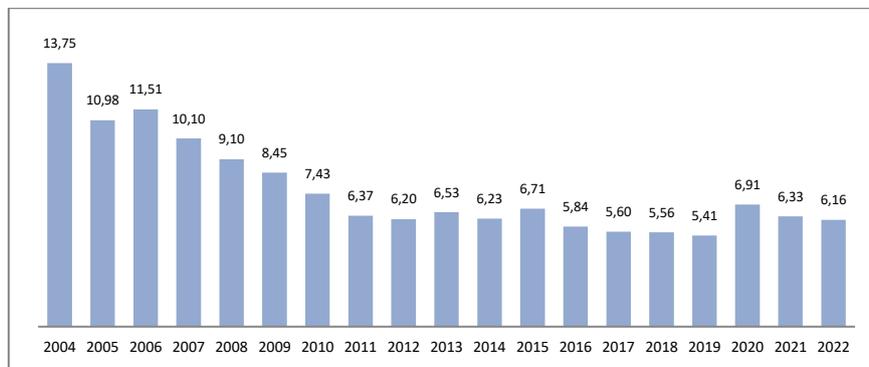
Upah minimum merupakan standar pengupahan pada tenaga kerja yang digunakan oleh pelaku industri atau pengusaha. Jika pengusaha membayarkan gaji di bawah upah minimum, banyak tenaga kerja yang akan menolak untuk bekerja sehingga semakin banyak orang yang menganggur (Alghofari, 2010). Namun, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin besar jika upah ditingkatkan sehingga pengusaha akan berupaya mengurangi pengeluaran perusahaan melalui pengurangan biaya produksi dan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara upah minimum dan tingkat pengangguran (Sopianti & Ayuningsasi, 2011). Lebih lanjut, penetapan upah minimum perlu dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan hasil produksi, dan secara simultan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengatasi tingginya tingkat pengangguran (Sahil dkk., 2023). Dalam konteks yang lebih luas, wilayah dengan upah minimum yang rendah cenderung memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Sebaliknya, daerah dengan standar upah minimum yang lebih tinggi memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula.

Indikator penting lainnya dalam mengatasi tingkat pengangguran adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam kurun waktu tertentu adalah indeks pembangunan manusia (IPM) (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Tiga dimensi dasar dalam pengukuran IPM

adalah kesehatan (umur panjang dan sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), dan tingkat penghidupan (standar hidup layak). Semakin baik tingkat kesehatan, pengetahuan, dan penghidupan masyarakat, semakin meningkat pula produktivitas dan kualitas kerja penduduk sehingga dapat membantu penurunan tingkat pengangguran (Qamariyah dkk., 2022; Soekapdjo & Oktavia, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia secara fisik dan mental sehingga terjadi peningkatan kapasitas dasar penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas, yang

mengarah ke permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi dan penurunan tingkat pengangguran.

Di tingkat regional, fluktuasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat dicermati di Provinsi Sumatera Utara (Gambar 1). TPT di provinsi ini cenderung mengalami penurunan selama dua dekade terakhir, dan mencapai titik terendah sebesar 5,41% pada tahun 2019. Meskipun begitu, angka TPT di wilayah ini mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022). Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, tingkat pengangguran dapat dipengaruhi berbagai hal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2004–2021.



Gambar 1. Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara, 2004-2022

METODE

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang telah dipublikasi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data *time series* sejak tahun 2004 hingga tahun 2021. Variabel bebas dalam kajian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X_1), upah minimum (X_2), IPM (X_3). Sementara itu, variabel terikat pada analisis ini adalah jumlah penduduk menganggur atau pengangguran (Y). Selanjutnya, kajian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan program Eviews 9, model yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_t$$

Keterangan:

- Y = Pengangguran (jiwa)
- X_1 = Pertumbuhan Ekonomi (%)
- X_2 = Upah Minimum (Rp)
- X_3 = IPM (%)
- β_0 = Konstanta
- i = 1,2,3 dan 4
- ε = *error term*

Sebelum melakukan analisis regresi, kajian ini terlebih dahulu melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Hasil uji normalitas Jarque-Bera sebesar 0,688216 atau lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hasil residual data ini terdistribusi normal dan asumsi klasik normalitas data sudah terpenuhi. Selanjutnya, uji Glejser dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan terbebas dari masalah

heteroskedastisitas. Nilai probabilitas *Chi-square* dari uji ini sebesar 0,8640 atau lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya.

Selanjutnya, tahapan uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antarvariabel bebas. Gejala autokorelasi dapat terjadi jika nilai probabilitas dengan uji Breusch-Godfrey lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan probabilitas sebesar 0,2446. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam kajian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Uji terakhir yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi adalah uji multikolinearitas. Dengan menggunakan metode VIF (*variation inflation factor*), uji ini dilakukan untuk seberapa besar nilai *tolerance* dari data yang digunakan. Hasil uji ini harus lebih kecil dari 10 untuk tiap variabel bebas agar dapat menunjukkan bahwa analisis dari kajian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai VIF variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,946492, variabel IPM sebesar 1,115560, dan variabel upah minimum sebesar 1,846827. Dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi berganda dalam kajian ini dapat disajikan dalam model sebagai berikut.

$$Y = 972471,6 - 39233,96 (\text{pertumbuhan ekonomi}) - 13,18786 (\text{IPM}) - 0,19172 (\text{Upah Minimum})$$

Nilai konstanta pada model mengindikasikan bahwa jika variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, IPM, upah minimum provinsi) bernilai konstan maka angka pengangguran sebesar 972471,6. Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -39233,96 dapat diartikan terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 39233,96 pada tiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Secara statistik, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan nilai probabilitas 0,0028. Nilai koefisien regresi IPM

sebesar -13,18786 mengindikasikan bahwa tiap peningkatan IPM sebesar 1% berpotensi menurunkan angka pengangguran sebesar 13,18786. Variabel ini juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap angka pengangguran dengan nilai probabilitas sebesar 0,0418. Selanjutnya, nilai koefisien regresi upah minimum provinsi sebesar -0,19172 menandakan bahwa tiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1% berpotensi menurunkan angka pengangguran sebesar 0,19172. Signifikansi pengaruh variabel ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,0000.

Uji t juga dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil uji-t antarvariabel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai t-hitung -3,623374. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,0028, dapat diartikan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel pengangguran. Selanjutnya, variabel IPM diperoleh nilai t-hitung -2,240301 dan nilai probabilitas sebesar 0,0418. Hasil ini mengindikasikan bahwa, secara parsial, variabel IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran. Terakhir, variabel upah minimum diperoleh nilai t-hitung -2,24030 dan nilai probabilitas sebesar 0,0418. Artinya, besar upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran.

Untuk menentukan apakah variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, kajian ini melakukan uji F. Hasil uji menunjukkan F-hitung sebesar 15,85756 sedangkan F-tabel sebesar 3,34. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM dan upah minimum secara simultan mampu memengaruhi angka pengangguran. Selanjutnya, uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Hasil uji memperlihatkan nilai *R-squared* sebesar 0,772626. Dengan kata lain, variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan upah minimum secara bersama-sama berkontribusi sebesar 77,26% terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2004–

2021. Namun, sekitar 22,74% penjelasan lainnya terkait angka pengangguran ini dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar model regresi pada kajian ini.

Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang negatif dan signifikan terhadap angka pengangguran di pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2004–2021. Temuan ini sesuai dengan kajian Amrullah dkk. (2019) yang menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah keluaran yang sekaligus berakibat pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi sama sekali. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, masalah pengangguran dan kemiskinan diharapkan dapat teratasi (Qomariyah, 2013). Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi regional sebab kondisi ini dapat mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa serta penyerapan penduduk usia produktif dalam pasar kerja (Palindangan & Bakar, 2021; Prawira 2018). Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran juga dapat dicermati pada kajian Amalia (2015). Temuan penelitian ini serta berbagai kajian sebelumnya dapat mengindikasikan bahwa ketidakpastian ekonomi berpengaruh terhadap siklus bisnis yang dapat menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi dampak faktor sosial ekonomi terhadap pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran akibat berkurangnya kesempatan kerja dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk lambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya potensi individu, hilangnya keterampilan kerja, penurunan pendapatan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai hal tersebut dapat menandakan efek negatif dari ketidakpastian ekonomi.

Selanjutnya, IPM merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat berhasil tidaknya suatu daerah dalam pembangunan sumber daya manusianya. Tiga dimensi dasar dalam ini, yaitu

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, saling berkaitan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah (Utami, 2020). Kajian ini menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2004–2021. Temuan penelitian ini sesuai dengan kajian Mahroji dan Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dipengaruhi kualitas hidup tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak positif pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan permintaan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat pengangguran. Peningkatan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan individu sekaligus meningkatkan produktivitas mereka. Ketika produktivitas meningkat, biaya produksi barang dan jasa dapat diturunkan, harga jual semakin murah, permintaan barang dan jasa meningkat, dan berbagai situasi tersebut secara simultan dapat mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja mereka dan, pada akhirnya, mengurangi angka pengangguran.

Variabel bebas terakhir yang dikaji pada tulisan ini adalah upah minimum yang ditengarai dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang layak. Penetapan upah minimum yang disesuaikan kebutuhan hidup layak pekerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dicermati tidak hanya melalui peningkatan konsumsi, tetapi juga kenaikan tabungan rumah tangga. Upah minimum merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk suatu pekerjaan maupun jasa dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan persetujuan maupun perundang-undangan yang telah ditetapkan (Prawiti dkk., 2021). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2004–2021. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kuntiarti (2018) yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat

pengangguran. Panjawa dan Soebagiyo (2014) juga mengemukakan bahwa kenaikan upah minimum akan dapat mengurangi pengangguran sebab adanya standar pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak dapat membuat para penduduk usia kerja yang tidak bekerja tidak lagi bersikap pilih-pilih pekerjaan dan banyak dari mereka yang akhirnya terserap dalam pasar kerja. Sebaliknya, jika upah yang diberikan perusahaan di bawah standar hidup yang layak, banyak penduduk usia kerja yang akan cenderung berpindah tempat kerja, bahkan memilih tidak bekerja atau menganggur. Oleh karena itu, rendahnya upah minimum regional di suatu wilayah dapat berdampak negatif terhadap tren angka pengangguran di wilayah tersebut (Yuliansyah, 2020).

Di negara berkembang seperti Indonesia, berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap tingkat pengangguran, termasuk kemajuan teknologi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perubahan struktur demografi penduduk, kesenjangan pendapatan, dan migrasi desa-kota oleh penduduk usia produktif (Kurnia & Septiani, 2021). Peningkatan angka pengangguran dapat berdampak langsung pada tingkat konsumsi, daya beli, dan kapasitas produksi di negara tersebut. Pada konteks yang lebih luas, tingginya angka pengangguran akibat kurangnya kesempatan kerja dapat menurunkan taraf hidup masyarakat yang mengakibatkan dampak buruk bagi individu dan lingkungan sekitarnya.

Dalam berbagai proses perencanaan kebijakan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran telah menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan di Indonesia (Gorry, 2013). Meskipun begitu, banyak hambatan dalam pasar tenaga kerja yang dapat mencegah individu yang tidak bekerja untuk mencari nafkah dan mengatasi kondisi menganggur yang dialami. Berbagai hambatan tersebut lebih cenderung memengaruhi kelompok penduduk miskin sehingga situasi ini dapat mengarah pada marginalisasi, ketidaksetaraan akses dan kesempatan, serta selanjutnya melanggengkan kondisi kemiskinan.

Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman implikasi makroekonomi dari situasi pengangguran di Indonesia, dengan

menggunakan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. Fluktuasi tingkat pengangguran yang dapat mencerminkan tren pasar tenaga kerja dari waktu ke waktu merupakan salah satu parameter penting dalam tinjauan kinerja pembangunan ekonomi di wilayah terkait. Hal ini dikarenakan angka pengangguran dapat memengaruhi kebijakan moneter, serta berkontribusi terhadap tren perubahan PDB. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Sinha (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan upah minimum diidentifikasi sebagai faktor kunci yang memengaruhi tingkat pengangguran.

KESIMPULAN

Kajian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan upah kerja minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2004–2021. Kenaikan nilai dari ketiga indikator tersebut terbukti dapat menurunkan tingkat pengangguran pada wilayah kajian. Situasi ini dapat menggambarkan keterkaitan erat berbagai indikator tersebut dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Perumusan kebijakan terkait perlu mendorong peningkatan produktivitas penduduk usia kerja melalui peningkatan modal manusia (*human capital*) mereka. Selain itu, penetapan upah kerja minimum oleh pihak yang berwenang menjadi salah satu faktor krusial dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dinamika penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyaturridho, Tanjung, A. A., & Hawariyuni, W. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 114-124. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.3945>
- Alghofari, F. (2010). *Analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11725527>.

- [pdf](#)
- Amalia, S. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Samarinda. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(2), 173-182. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no2.173-182>
- Amrullah, W. A., Istiyani, N., & Muslihatinningsih, F. (2019). Analisis determinan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2007-2016. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 43-49. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11074>
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2022). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Agustus 2021. Badan Pusat Statistik.
- Effendy, R. S. (2019). Pengaruh upah minimum terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), 115-124. <https://doi.org/10.34152/fe.14.1.115-124>
- Gorry, A. (2013). Minimum wages and youth unemployment. *European Economic Review*, 64, 57-75. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2013.08.004>
- Hapsari, T. (2011). *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2913/1/TUNJUNG%20HA%20PSARI-FEB.pdf>
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 1-9. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/view/8241/0>
- Kurnia, R. E., & Septiani, Y. (2021). Social and economic factors determining the unemployment rate in the Bregasmalang Region 2010-2020. *Eko-Regional*, 16(1), 63-73. <https://dx.doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1800>
- Latifah, N. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 106-117. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/17601>
- Mahihody, A. S., Engka, D. S. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh upah dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24-34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20253>
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 51-72. <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principle of economics* (8th edition). Cengage Learning.
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 65-80. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/149>
- Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). Efek peningkatan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 48-54. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1283>
- Prawira, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(1), 162-168. <http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v1i1.4735>

- Prawiti, I. M., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Analisis pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap pengangguran di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6).
<http://dx.doi.org/10.46799/jst.v2i6.300>
- Qamariyah, L., Mardianita W.P, O., & Rusgianto, S. (2022). Pengaruh IPM, investasi, dan UMP terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2013-2020. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.1-15>
- Qomariyah, I. (2013). Pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–8.
<https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p>
- Sahil, D., Syahwier, C. A., Sembiring, S. A., & Sari, R. L. (2023). Analisis pengaruh upah minimum regional, investasi, dan jumlah penduduk terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 1-8.
<https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.22>
- Sanitra, N. (2021). Effect of economic growth and human development index (IPM) on unemployment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(01), 13-16.
<https://doi.org/10.58471/ekonomi.v10i01.57>
- Sinha, J. K. (2023). Impact of economic growth, minimum wage, and human development index on unemployment in India during the post-reform era. *Current Trends in Business Management*, 1(1), 9-18.
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 5(2), 94-102.
<https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Sopianti, N. K., & Ayuningsasi, A. A. K. (2011). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(4), 216-225.
- Suhendra, I., & Wicaksono, B. H. (2020). Tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 1–17.
<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>
- Sukirno, S. (2009). *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Taime, H., & Djaelani, P. N. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 54–66.
<https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurna1-esensi/article/view/137>
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
<https://doi.org/10.33059/jse.v4i2.2303>
- Yuliansyah. (2020). Hubungan antara pengangguran dan upah minimum di Indonesia. *Cross-border*, 3(2), 338–345.

